



BPMP | Provinsi
Kepulauan Riau

Melayani ATS/Anak Laut

‘Pembelajaran’ Bermutu untuk Semua di Kabupaten Lingga

From Schooling to Learning

Atria Serpong, 22 September 2025

RAMAH

PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

Pemerintah berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu untuk seluruh warga negara Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 31 ayat 1)

“Setiap warga negara berhak **mendapatkan pendidikan**.”

UU Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003)

Pasal 5

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh **pendidikan yang bermutu**

Pasal 11

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya **pendidikan yang bermutu** bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi

Pasal 1

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyediakan pengelolaan, proses pembelajaran, dan hasil belajar yang berkualitas

Tersedia di satuan pendidikan

Penyediaan mekanisme untuk memastikan penyelenggaraan sesuai standar mutu

OECD (2023); Indra (2023); Brown dkk (2021); Garira (2020); Stockmann, dkk (2020); Li, dkk (2019); OECD (2013); MacBeath (2010)

Rasional

Akademik

Studi Pendidikan dan Kehidupan Masyarakat Suku Laut

Hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kab. Lingga belum terpenuhi, selain tidak tersedianya sekolah yang memadai, mereka lebih menikmati menjalani kehidupan di dalam sampan dari pada bersekolah (Tan, 2019)

Sebagian anak-anak suku laut usia sekolah yang ada di Pulau Senang, Lingga sudah bersekolah (SD, SMP) namun mayoritas dari mereka putus sekolah bahkan tidak pernah bersekolah karena jarak sekolah jauh dari tempat kediaman dan kebiasaan berkehidupan di laut (Elsera dkk, 2022)

Anak-anak dari masyarakat Suku Laut di desa Berakit, Bintan, putus sekolah dan kehilangan motivasi untuk bersekolah, karena mereka tidak biasa meninggakan laut apalagi mejauh dari kehidupan laut (Saniah, 2022)

Masyarakat Suku Laut di Perkampungan Air Ingat Desa Baran Kec. Bakung Serumpun, Lingga, memandang sekolah bukanlah suatu tempat yang menjanjikan dan menjamin kehidupan anak-anak mereka ke depan, daripada bertahan hidup di laut (Pratama, 2024)

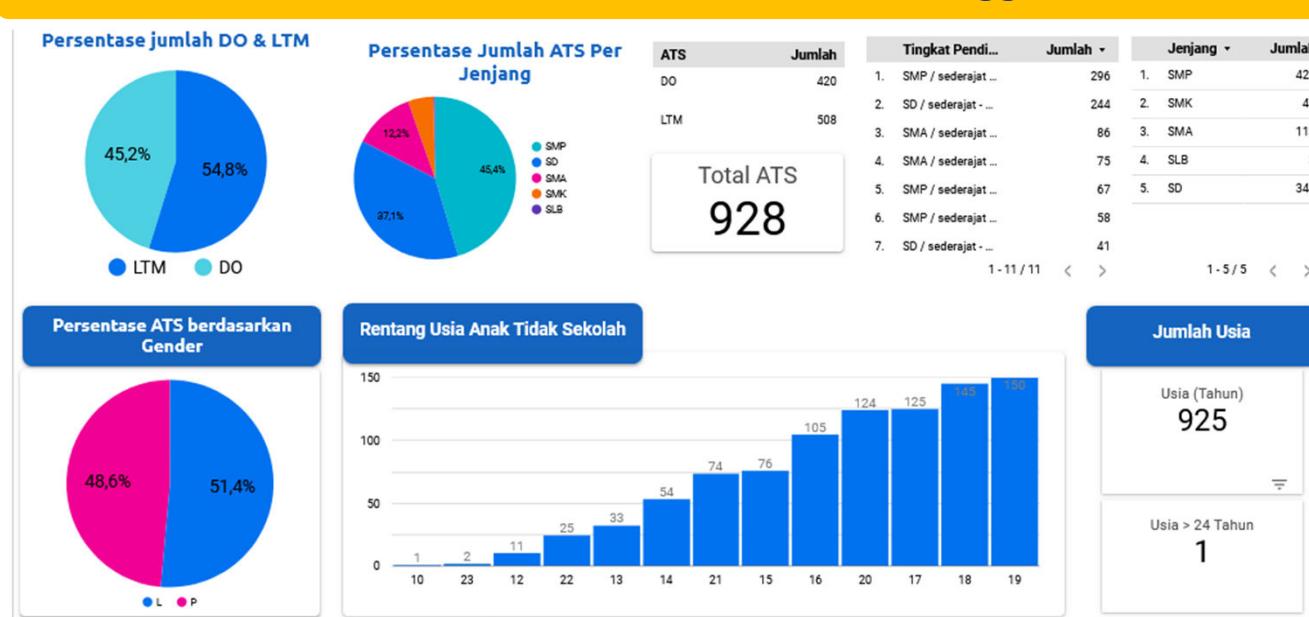
Rendahnya partisipasi pendidikan anak suku laut dan tingginya angka anak tidak sekolah salah satunya disebabkan tidak adanya program pemerintah dan pemda untuk melayani dengan serius pemenuhan hak pendidikan mereka (Nayangsari, dkk, 2022)

Suku laut (*Sea Nomads*) adalah salah satu masyarakat adat suku bangsa Melayu tua yang hidup berpindah pindah dengan menggunakan sampan mendiami wilayah perairan Kepulauan Riau

Rasional

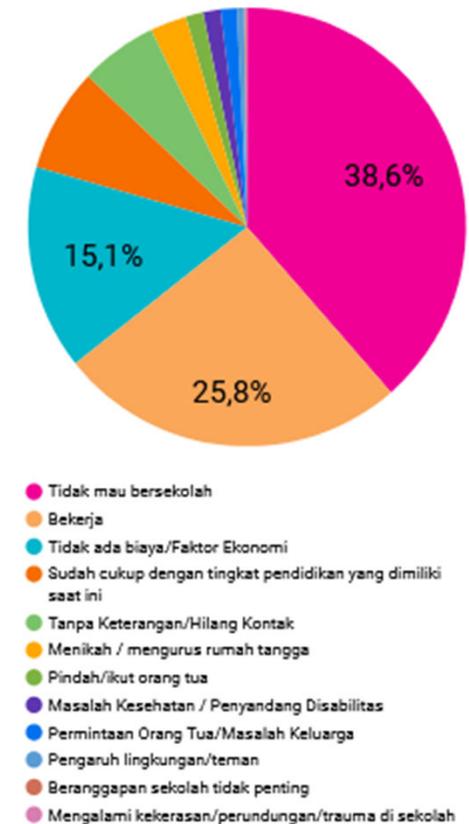
Data dan Informasi

Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Kab. Lingga



Dari 928 anak tidak sekolah di Lingga, sebanyak 421 atau 45,4% adalah anak di usia SMP. Mayoritas anak tidak sekolah disebabkan mereka tidak mau bersekolah, sebesar 358 atau 38,6%

Data hasil verval Disdikpora Lingga dan BPMP (18/9)



Sumber: Rekapitulasi Analisis Data Anak Tidak Sekolah Kepulauan Riau (RADAR) BPMP Prov. Kepulauan Riau, 22 September 2025

Dukungan Pemda Lingga

Informasi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga

Dukungan Pemkab Lingga Terhadap Wajar 13 Tahun & Penanganan ATS



Dukungan Pemerintah Daerah Lingga

1. SK Bupati Lingga No. 191/KPTS/IV/2025 tentang Perubahan 10 Paket Strategis.
2. Kemitraan SKB Lingga & Lapas Dabo Singkep untuk Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C.
3. Bantuan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP.
4. Bantuan 10 unit transportasi laut untuk siswa di pulau.
5. Bantuan sepatu dan lunchbox untuk anak PAUD.
6. Penyelenggaran program pendidikan afirmasi (kelas jauh) untuk jenjang SD dan SMP



Dukungan OPD Lain

Pemangku kepentingan: Dinas Sosial, Bappeda, DPMD, Kemenag, Disdukcapil.

Kendala: utusan OPD sering berganti sehingga informasi terputus.

Komitmen dukungan lintas OPD:

- Disdukcapil → Pemadanan data kependudukan.
- DPMD → Dorong desa lakukan verval ATS.
- Kemenag → Dukungan di madrasah.
- Bappeda → Mengawal perencanaan daerah



ecology.or.id/en/seanomadsindigenousriauarchipelago

Sumber: Rekapitulasi Analisis Data Anak Tidak Sekolah Kepulauan Riau (RADAR) BPMP Prov. Kepulauan Riau, 22 September 2025

Strategi Penanganan ATS/Anak Suku Laut

Strategi Implementasi Peningkatan Mutu Pendidikan secara Bergotong Royong



Kolaborasi itu penting, untuk menyatukan 'puzzle' potongan-potongan masalah yang terpisah dan dapat disusun (dituntaskan) kembali menjadi satu kesatuan penyelesaian yang utuh dan berdampak



Diadaptasi dari skema pengembangan PSKP, 2017



Terima kasih

RAMAH

PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA



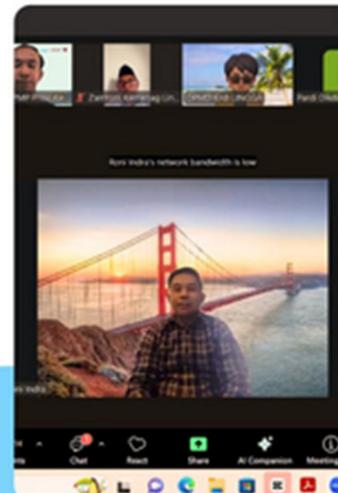
Rakor tindak lanjut Program Wajib Belajar 13 Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

BPMP Kepri Dorong Kolaborasi Atasi Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Lingga

Selasa, 23 September 2025



RAKOR TINDAK LANJUT WAJAR 13 TAHUN
DAN ATS KABUPATEN LINGGA



KGTK KEPRI HOS

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten Lingga menggelar rapat koordinasi tindak lanjut Program Wajib Belajar 13 Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Selasa (23/9/2025) secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pendampingan yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 18 September 2025 di Kantor Bupati Lingga. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Lingga Mokhtaraldi menyampaikan bahwa hingga kini telah dibuat 19 akun desa dari 4 kecamatan untuk memverifikasi data ATS. Dalam dua minggu terakhir, tim akan mendeteksi alasan utama anak tidak bersekolah, mulai dari pindah ke luar negeri, kondisi disabilitas, hingga faktor geografis.